



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

Jakarta 12 Desember 2018

Nomor : S. 1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/12/2018  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2019

Kepada Yth.

- 1. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi**
- 2. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten**
- 3. Para Walikota Kepala Daerah Kotamadya**

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penambahan tabel DIKPLHD yang semula berjumlah 53 tabel bertambah menjadi 65 tabel. Perubahan analisis yang semula PSR (*Pressure-State-Response*) berubah menjadi DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*), tata cara penyusunan dan penilaian sebagaimana terlampir.
2. Untuk input data yang semula di Sistem Informasi Lingkungan Hidup pindah ke dataalam.menlhk.go.id .
3. Terkait hal tersebut di atas, untuk proses penilaian pemberian penghargaan tersebut, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dimaksud dapat kami terima paling lambat 5 Mei 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM  
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Kepala Pusat P3E di seluruh Indonesia

2018

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH**



**PUSAT DATA DAN INFORMASI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

## Kata Pengantar

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya hak kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan.

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DIKPLHD dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen DIKPLHD ini dari provinsi dan kabupaten/kota ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*).

DIKPLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi. Sebagai penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DIKPLHD serta *leadership* kepala daerah dalam pengelolaan LHK secara baik, setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi.

Agar kualitas data dan informasi lingkungan hidup dapat meningkat dari waktu ke waktu (*continuous improvement*), maka melalui Pedoman Penyusunan DIKPLHD harus menjadi acuan sah bagi seluruh pihak dalam penyusunan DIKPLHD.

Terima Kasih.



Jakarta, November 2018  
Sekretaris Jenderal LHK

Dr. Ir. H. Bambang Hendroyono, MM

## DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	
	Daftar Isi	
Bab I	Tata Cara Penyusunan	1
	a. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen	1
	b. Penetapan Isu Prioritas	1
	c. Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi	1
Bab II	Tata Cara Penulisan	3
	a. Tata Cara Umum	4
	b. Sistematika Penyajian	4
Bab III	Tata Cara Penilaian	9
	a. Tata Kelola Dokumen	9
	b. Tahapan Penilaian	9
	Lampiran	

## **BAB I. TATA CARA PENYUSUNAN**

### a. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Tim Penyusun dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009. DIKPLHD ini terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu :

- (1) Buku I, adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 15 halaman.
- (2) Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, Pressure State, Impact and Response Analysis/ DPSIR*).

### b. Penetapan Isu Prioritas

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan perencana kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan DPSIR.

### c. Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi

DIKPLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib *diupload* pada website masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk file elektronik (soft file) melalui akun SILHKD dan surat elektronik ke alamat : [nirwasitantra@menlhk.go.id](mailto:nirwasitantra@menlhk.go.id). Format saji dokumen dalam bentuk PDF. Masing-masing daerah wajib mengisi tabel data melalui aplikasi SILHKD. OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menyampaikan DIKPLHD kepada OPD Bidang Lingkungan Hidup Provinsi guna memperoleh rekomendasi sedangkan OPD Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menyampaikan DIKPLHD kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion (P3E) guna memperoleh rekomendasi.

Rekomendasi yang diberikan oleh P3E dan OPD bidang Lingkungan Hidup Provinsi didasarkan kepada kriteria yang tertuang pada Sub Bab Tatacara Penilaian.

DIKPLHD berikut rekomendasi dari OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dan Provinsi dapat disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal KLHK atau secara elektronik melalui alamat: [nirwasitantra@menlhk.go.id](mailto:nirwasitantra@menlhk.go.id) paling lambat tanggal 5 Mei.

## BAB II. TATA CARA PENULISAN

### a. Tata cara Umum

Tata cara umum terdiri atas format baku penulisan dan sistematika penyajian dokumen. Format baku penulisan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengetikan

##### a). Batas dan Ukuran Kertas

Batas kiri — Batas kanan — Batas atas — Batas bawah : 4 cm — 3 cm — 3 cm — 3 cm dari tepi kertas. Ukuran kertas A4.

##### b). Huruf dan Spasi

Huruf menggunakan jenis huruf Tahoma 12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan – *justify*) dengan spasi 1,5.

#### 2. Penomoran Halaman

Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin. Angka romawi digunakan dalam penomoran Bab. Khusus halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

#### 3. Sampul/Cover

Sampul/Cover dengan warna hijau muda (tanpa gambar) yang memuat Judul **DOKUMEN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN** (dengan ukuran huruf 14/16 dan **hanya** dilengkapi dengan logo daerah dan KLHK).

#### 4. Penomoran Tabel Utama dan Tabel Tambahan

Penomoran tabel utama disesuaikan dengan daftar tabel yang telah diberikan sedangkan tabel tambahan yang merupakan penunjang tabel utama (jika diperlukan) maka menambahkan huruf kecil setelah nomor tabel utama (contoh. Tabel 11. a)

Setiap Tabel harus dilengkapi dengan:

1	Judul Tabel	:	diisi sesuai format yang tertulis
2	Provinsi/Kabupaten/Kota	:	diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan
3	Tahun Data	:	diisi dengan tahun data yang digunakan
4	Keterangan	:	diisi dengan penjelasan tanda-tanda baca seperti (-), (NA), (td), (0) atau penjelasan tentang keberadaan komponen/ sub komponen yang diminta dalam tabel.
5	Sumber	:	diisi dengan sumber perolehan data

### b. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian DIKPLHD terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

## 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas :

- 1) Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
- 2) Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 3) Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 4) Daftar Isi
- 5) Daftar Tabel
- 6) Daftar Gambar
- 7) Daftar Lampiran

## 2. Bagian Utama

Bagian utama, terdiri atas .

- 1) Bab I Pendahuluan. Pendahuluan memuat mengenai :(a) latar belakang; (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan.
- 2) Bab II. Pada Bab II ini mengkategorikan Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact*, dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah ke dalam :
  1. Tata guna lahan. Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, wajib menuangkan data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan laut. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan lindung = 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah ybs). Lengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan



atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung. Analisis *driving force, pressure, state, impact*, dan *response* wajib didukung dengan data berkala (time series). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung, faktor *driving force*-nya (pemicu), *pressure*-nya dijelaskan dan didukung dengan data berkala (time series), demikian juga jelaskan bagaimana *impact* yang terjadi dan *response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Data yang dapat digunakan untuk mendukung analisis PSR pada sub bab ini, antara lain Tabel 1 s/d Tabel 17. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

2. Kualitas air. Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi *driving force*-nya adalah banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, *pressure* adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, *response*-nya mendorong penataan industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi laut dan sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/ d Tabel 30. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
3. Kualitas udara. Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh :kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (*pressure*) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (*driving force*) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan

dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 36 s/ d Tabel 40. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

4. Resiko bencana. Bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). Driving Force diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 44 s/d Tabel 47. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
5. Perkotaan. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis, selanjutnya dijelaskan pressure dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan response-nya adalah berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan sampah spesifik. Data yang dituangkan berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam pressure adalah penyebab terjadinya persoalan sampah. Response adalah upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan

sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 31, 35 dan Tabel 49 s/d Tabel 52. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

6. Tata Kelola. Data seperti Pelestarian Kearifan lokal lingkungan hidup, perijinan, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah merupakan kondisi eksisting atau *driving force* (pendorong/pemicu) yang ditampilkan di dalam data. *Pressure* seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan LH, sedangkan jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staff fungsional yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa merupakan kondisi eksisting atau *state*. Kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan merupakan *response* dari *pressure* yang timbul. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 18 s/d Tabel 21, Tabel 41 s/d Tabel 43, Tabel 53 s/d Tabel 63 dan Tabel 65. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
  7. Lain-lain. Tabel yang tidak terakomodir pada isu lingkungan dan kehutanan seperti Tabel 32 s/d Tabel 34 dan Tabel 34.
- 3). Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada Bab II. Isu prioritas ini dapat mengenai *pressure* (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), *state* (kondisi atau potret LH pada saat dinilai), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis *pressure* yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi *state*). Isu prioritas paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebab-penyebabnya, dan/atau persoalan respon yang dilakukan; dan (2) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgent*). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.
  - 4) Bab IV. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam

upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada) harus dituangkan juga di dalam bab ini. Data yang mendukung dituangkan se jelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 64 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya

- 5) Bab V. Penutup. Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/ d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.
- 6) Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer.
- 7) Lampiran. Keseluruhan data utama dan data tambahan wajib dicantumkan dalam lampiran sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun.

Jenis data minimal yang harus ada dalam penyajian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi SILHKD atau website [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)

### III. TATA CARA PENILAIAN

#### a. Tata Kelola Dokumen

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berikut rekomendasi penilaian paling lambat setiap tanggal 5 Mei, disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam format PDF.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dinilai oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### b. Tahapan Penilaian

##### 1. Tingkat Provinsi dan Ekoregion

Tingkat propinsi hanya memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan bagi DIKPLH yang dikirimkan oleh kota dan kabupaten.

Tingkat Ekoregion hanya memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan bagi DIKPLH yang dikirimkan oleh Propinsi

Seluruh hasil verifikasi disampaikan ke Pusat Data dan Informasi paling lambat setiap tanggal 5 Mei.

##### 2. Tingkat Kementerian LHK

Penilaian dilakukan melalui tahapan: (1) tahapan penapisan, yaitu penilaian atas buku ringkasan eksekutif, kelengkapan dan kemutakhiran data, sumber data, kelengkapan administrasi dan kepatuhan; serta (2) tahapan penilaian atas : (a). analisis hubungan kausalitas antara isu prioritas dengan data yang disajikan dengan menggunakan pendekatan DPSIR, (b) Inovasi daerah yang *genuine* (asli) dan berdampak luas bagi kelestarian lingkungan (3) tahapan sidang pleno penjurian untuk menentukan pemenang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya tindak pidana korupsi.

Hasil penilaian diumumkan paling lambat pada tanggal 2 Juni atau menyesuaikan dengan keadaan melalui website <http://www.menlhk.go.id>. Penghargaan Nirwasita Tantra akan diberikan kepada yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menyusun dan menyampaikan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tepat pada waktunya.

**DATA MINIMAL YANG WAJIB DITUANGKAN DALAM DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya  
Provinsi/ Kabupaten/ Kota  
Tahun Data:

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung						
		2. Kawasan Bergambut						
		3. Kawasan Resapan Air						
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai						
		2. Sempadan Sungai						
		3. Kawasan Sekitar Danau						
		4. Ruang Terbuka Hijau						
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam						
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya						
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut						
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut						
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau						
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut						
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut						
			8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan					
Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor							
	2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang							



Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Budidaya								

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) - (4) Nama Kawasan
- (5) Diisi dengan luas kawasan dalam satuan hektar (ha)
- (6) Diisi dengan tutupan lahan vegetasi dalam satuan hektar (ha)
- (7) Diisi dengan tutupan lahan area terbangun dalam satuan hektar (ha)
- (8) Diisi dengan tutupan lahan tanah terbuka dalam satuan hektar (ha)
- (9) Diisi dengan tutupan badan air dalam satuan hektar (ha)



Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun :

No.	Kabupaten/Kota / Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Sumber:

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.
- (3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman dalam satuan hektar (Ha).
- (4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar (Ha).
- (5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/lading dalam satuan hektar (Ha).
- (6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau komoditi tertentu kecuali kebun campuran dalam satuan hektar (Ha).
- (7) Diisi dengan luas hutan dalam satuan hektar (Ha).
- (8) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar (Ha).

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun :

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	
2.	Hutan Lindung	
3.	Taman Nasional	
4.	Taman Wisata Alam	
5.	Taman Buru	
6.	Cagar Alam	
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	
3.	Hutan Kota	
4.	Taman Hutan Raya	
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Luas kawasan hutan menurut fungsi dan status sesuai ketentuan Kementerian Kehutanan yang dituangkan dalam RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota

- (1) Diisi dengan angka 1,2,3,...
- (2) Cukup jelas
- (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)

Tabel- 4. Keadaan Flora dan Fauna  
Prov/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data:

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hewan menyusui	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				
2. Burung	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				
3. Reptil	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
4. Amphibi	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				
5. Ikan	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				
6. Keong	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				
7. Serangga	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				
8. Tumbuh-tumbuhan	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				
	dst	dst				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Tabel:

(1). Diisi dengan Nama golongan flora dan fauna yang ada

(2). Diisi dengan nama latin spesies flora dan fauna

(3). Diisi dengan nama local spesies flora dan fauna

(4) – (7). Diisi dengan Ya atau Tidak

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun:

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang ditangkarkan
1	2	3	4

Sumber :

Keterangan Tabel :

- Kolom 2. Diisi dengan Nama perusahaan yang mendapat ijin penangkaran
- Kolom 3. Diisi dengan Nomor SK dan tanggal berlakunya ijin penangkaran
- Kolom 4. Diisi dengan Jenis Satwa atau tumbuhan yang ditangkar

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Kabupaten/ Kota / Kecamatan	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota/kecamatan yang ada di provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan
- (3) Diisi dengan luas lahan kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan luas lahan kritis luar kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha)
- (5) Diisi dengan jumlah lahan sangat kritis dalam kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha)
- (6) Diisi dengan jumlah lahan sangat kritis luar kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha)

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Data:

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< 20 cm	0,2 – 1,3		
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
3	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
4	100 – 150 cm	9,0 – 12		
5	> 150 cm	> 12		

Keterangan:

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- (4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun) (5) Diisi dengan kata “Melebihi” atau “Tidak”

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Data :

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketebalan Solum	< 20 cm		
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %		
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;		
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm <sup>3</sup>		
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %		
6	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0		
7	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5		
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
9	Redoks	< 200 mV		
10	Jumlah Mikroba	< 10 <sup>2</sup> cfu/g tanah		

Keterangan :  
Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3, dst
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
- (4) Diisi angka hasil pengamatan dengan satuan masing-masing parameter
- (5) Diisi dengan kata "Melebihi" atau "Tidak"

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Data :

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Subsidence Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut $\geq$ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m		
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH $\leq$ 2,5		
3	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm		

Keterangan:  
Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- (4) Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing
- (5) Diisi dengan kata "Melebihi" atau "Tidak"



Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove
- (3) Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan persentase tutupan mangrove
- (5) Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon/hektar(Ha)

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst		

Keterangan:

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun

(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar (Ha)

(4) Diisi dengan prosentase area kerusakan

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Data

No.	Kab./Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi luasan tutupan terumbu karang menggunakan dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik
- (5) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik
- (6) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang
- (7) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak

Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

<b>No.</b>	<b>Jenis Penggunaan Baru</b>	<b>Luas Lama (Ha)</b>	<b>Luas Baru (Ha)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman		
2	Industri		
3	Tanah kering		
4	Perkebunan		
5	Semak belukar		
6	Tanah kosong		
7	Perairan/kolam		
8	Lainnya (sebutkan)		

Penjelasan Isi Tabel:

- (1) Nomor urut
- (2) Cukup jelas
- (3) Diisi dengan luas lahan sebelum perubahan dalam satuan hektar (ha)
- (4) Diisi dengan luas lahan sesudah perubahan dalam satuan hektar (ha)

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tambang	...	Besar	...	
			Menengah	...	
			Kecil	...	
			Rakyat	...	
2.	Perkebunan	...	Besar	...	
			Menengah	...	
			Kecil	...	
			Rakyat	...	
3.	Pertanian	...	Besar	...	
			Menengah	...	
			Kecil	...	
			Rakyat	...	
4.	Pemanfaatan Hutan	...	Besar	...	
			Menengah	...	
			Kecil	...	
			Rakyat	...	

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3 ....
- (2) Diisi dengan jenis pemanfaatan lahan yang ada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- (3) Diisi dengan jumlah pemanfaatan lahan
- (4) Diisi dengan besarnya skala usaha dari jenis pemanfaatan lahan (Besar/Menengah/Kecil/Rakyat)
- (5) Diisi dengan luas lahan pemanfaatan lahan masing-masing skala usaha dengan satuan ha
- (6) Diisi apabila ada penjelasan pada masing-masing jenis pemanfaatan lahan

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian Provinsi/Kabupaten/Kota :

Tahun Data :

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3 ....
- (2) Diisi dengan nama perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Penambangan
- (3) Diisi dengan Jenis Bahan Galian
- (4) Diisi dengan Luas Ijin Usaha Penambangan dalam satuan Hektar
- (5) Diisi dengan Luas Areal Penambangan dalam satuan Hektar
- (6) Diisi dengan produksi dalam satuan ton

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data:

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
<b>Dst.</b>							

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3,....
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan target penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan luas realisasi penghijauan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)
- (5) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah daerah pada kegiatan penghijauan dalam satuan batang
- (6) Diisi dengan target reboisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)
- (7) Diisi dengan luas realisasi reboisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam satuan hektar (Ha)
- (8) Diisi dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam oleh instansi pemerintah daerah pada kegiatan reboisasi dalam satuan batang

**Definisi Penghijauan:**

Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan (PP No. 76 Tahun 2008).

**Definisi reboisasi:**

Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang – alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan (PP No. 76 Tahun 2008).

Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun:

No.	Kab/kota/kec	Luas (Ha)	kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6

Keterangan tabel:

Kolom 1: Cukup jelas

Kolom 2: Cukup Jelas

Kolom 3: Cukup Jelas

Kolom 4: Cukup Jelas

Kolom 5: Cukup Jelas

Kolom 6: Cukup jelas



Tabel-18 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Provinsi/Kab/Kota :

Tahun Data:

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5

Sumber :

Keterangan :

Kolom 1 : No Urut

Kolom 2 : Apabila propinsi maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kabupaten

Kolom 2 : Apabila Kab/Kota maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di Kecamatan

Kolom 3 : Cukup Jelas

Kolom 4 : Cukup Jelas

Kolom 5 : Cukup Jelas

Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Provinsi/Kab/Kota :

Tahun Data:

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5

Sumber :

Keterangan Tabel :

Kolom 1: Nomor Urut

Kolom 2 : Apabila Propinsi maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di kabupaten

Kolom 2 : Apabila Propinsi maka data yang diminta adalah jumlah dan luas izin di kecamatan

Kolom 3: Cukup Jelas

Kolom 4 : Cukup Jelas

Kolom 5 : Cukup Jelas

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

Provinsi/Kab/Kota :

Tahun Data :

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4

Sumber :

Keterangan Tabel :

Kolom 1. Nomor Urut

Kolom 2. Diisi dengan spesies TSL yang diperdagangkan

Kolom 3. Diisi dengan bagian-bagian yang diperdagangkan misal : kulit, kuku, Utuh (mati/hidup)

Kolom 4. Diisi dengan Status menurut CITES: Appendix 1, 2, atau 3

Tabel-21. Jumlah dan Ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Provinsi/Kab/Kota :

Tahun Data :

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Sumber :

Keterangan :

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Nama Perusahaan yang memperoleh ijin

Kolom 3 : Cukup Jelas

Kolom 4 : Cukup Jelas

Kolom 5 : Cukup Jelas

Kolom 6 : Cukup Jelas

Kolom 7 : Cukup Jelas

Kolom 8 : Cukup Jelas

Kolom 9 : Cukup Jelas



Tabel-23. Kualitas Air Laut  
 Provinsi/Kabupaten/Kota:  
 Tahun Data:

No	Nama Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mr)	Bau	Keceerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN <sup>-</sup> ) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(27)	(28)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Isi dengan angka 1,2,3,....
- (2) Isi dengan nama lokasi pemantauan (Pelabuhan, wisata bahari, .....)
- (3) Isi dengan tanggal pemantauan di masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)
- (4) Isi dengan nama lokasi pengambilan sampling
- (5) - (28) Cukup jelas. Untuk data berupa angka dapat diisi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data:

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,...
- (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pengamatan
- (3-14) Diisi dengan menggunakan angka dalam satuan milimeter (mm)

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota	Mata Air	Ledeng/ PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

Keterangan:

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

- (1) Diisi dengan angka 1,2,3,...
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum.  
Definisi air ledeng: sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.
- (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum.  
Definisi sumur: air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0.8 meter diatas tanah dan 3 meter ke bawah tanah serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.
- (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum.
- (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum.
- (7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum.
- (8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(9) sebagai sumber air minum



Tabel-26. Kualitas Air Hujan  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO <sub>4</sub>	NO <sub>3</sub>	Cr	NH <sub>4</sub>	Na	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan									
Feb									
Mar									
Apr									
Mei									
Jun									
Jul									
Ags									
Sep									
Okt									
Nop									
Des									

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Cukup Jelas
- (2) - (10) Diisi dengan hasil pengukuran setiap bulan

Tabel-27. Kondisi Sungai  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Min (m <sup>3</sup> /dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3,...
- (2) Diisi dengan nama sungai
- (3) Diisi dengan menggunakan angka panjang sungai dalam satuan kilometer (km)
- (4) Diisi dengan menggunakan angka lebar permukaan sungai dalam satuan meter (m) (5) Diisi dengan menggunakan angka lebar dasar sungai dalam satuan meter (m)
- (6) Diisi dengan menggunakan angka kedalaman sungai dalam satuan meter (m)
- (7) Diisi dengan menggunakan angka debit maksimal air sungai dalam satuan meter kubik per detik (m<sup>3</sup>/detik)
- (8) Diisi dengan menggunakan angka debit minimal air sungai dalam satuan meter kubik per detik (m<sup>3</sup>/detik)

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Diisi dengan nama danau,waduk,situ,embung
- (2) Diisi menggunakan angka luas danau/ situ/ waduk / embung dalam satuan hektar (Ha)
- (3) Diisi menggunakan angka volume air danau/ situ/ waduk / embung dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>)

Tabel-29. Kualitas Air Sungai  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data:

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)	
			Lintang	Bujur																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1.		a.																								
		b.																								
		c.																								
		d...																								
		e....																								
		f....																								
		g....																								
2.																										

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel:

Data Kualitas air sungai Provinsi minimal menggunakan data dari dana Dekonsentrasi pemantauan kualitas air sungai.

(1) Isi dengan nomor urut angka 1,2,3,...

(2) Isi dengan nama sungai yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan

(3) Isi dengan nama lokasi titik pantau

(4) – (5) titik koordinat pengambilan sampel air sungai.

(6) Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)

Kolom :

(7) – (26) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
			Lintang	Bujur																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.	Danau ....																									
	Danau....																									
2.	Situ...																									
	Situ...																									
3.	Embung...																									
	Eumbung...																									

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Isi dengan nomor urut angka 1,2,3,...
- (2) Isi dengan nama danau yang masuk dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- (3) Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling (tgl/bln/thn)
- (4) – (5) ztitik koordinat pengambilan sampel air Danau/Waduk/Situ/Embung.
- (6) – (28) Isi dengan angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota/Kec.	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dst						

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3 , dst
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun dokumen atau diisi dengan kecamatan yang ada di kabupaten/kota penyusun dokumen
- (3) Diisi dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di Kabupaten/Kota/Kecamatan.
- (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri.
- (5) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar bersama.  
Definisi Bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.
- (6) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan fasilitas tempat buang air besar umum.  
Definisi Umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.
- (7) Diisi dengan jumlah rumah tangga (KK) dengan tempat buang air besar di Sungai, Kolam, Kebun, Laut.

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	

Keterangan :

L = Laki-Laki

P = Perempuan

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

(1) Cukup jelas

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada diprovinsi penyusun laporan

(3) - (10) Diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

Keterangan :

Sumber :

**Penjelasan Isi Tabel :**

- (1) Cukup jelas
- (2) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa



Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Keterangan:  
Sumber :

**Penjelasan Isi tabel :**

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota
- (4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masing-masing kabupaten/kota
- (5) Diisi dengan prosentase rumah tangga miskin di masing-masing kabupaten/kota

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m <sup>3</sup> /hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m <sup>3</sup> /tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Bergerak :						
	1.						
	2.						
	Dst						
	b. Tidak Bergerak						
	1.						
	2.						
	Dst						

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Diisi dengan nomor urut angka 1,2,3, dst
- (2) a. Bergerak : diisi dengan Transportasi darat, laut dan udara, contohnya tempat sarana transportasi darat antara lain ; terminal bus Pulogadung, stasiun kereta api Solo Balapan dll  
b. Tidak bergerak : diisi dengan aktivitas seperti industri, Rumah Sakit, hotel, tempat wisata, dst
- (3) Diisi dengan Lokasi, Jenis, Klasifikasi Sumber Pencemar. Contoh : Terminal, Pelabuhan, Tempat Wisata, Hotel, Rumah Sakit, Pabrik, dst
- (4) Diisi dengan luas areal sumber pencemaran
- (5) Diisi dengan perkiraan volume limbah padat
- (6) Diisi dengan perkiraan volume limbah cair
- (7) Diisi dengan perkiraan volume limbah B3 padat
- (8) Diisi dengan perkiraan volume limbah B3 cair

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)											
1													
2													
3													
4													
5	Dst												

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pengamatan
- (3) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

Lokasi	Lama Pengukuran	SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	CO (µg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	O <sub>3</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	HC (µg/Nm <sup>3</sup> )	PM10 (µg/Nm <sup>3</sup> )	PM2,5 (µg/Nm <sup>3</sup> )	TSP (µg/Nm <sup>3</sup> )	Pb (µg/Nm <sup>3</sup> )	Dustfall (µg/Nm <sup>3</sup> )	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm <sup>3</sup> )	Fluor Index (µg/Nm <sup>3</sup> )	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm <sup>3</sup> )	Sulphat Index (µg/Nm <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan :  
Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Isi dengan nama lokasi pemantauan
- (2) Diisi dengan angka lama pengukuran pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah

Kolom :

- (2) – (16) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data:

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :											
1.	Kimia dasar											
2.	Mesin dan logam dasar											
3.	Industri Kecil											
4.	Aneka Industri											
B	Rumah Tangga :											

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi sesuai dengan klasifikasi penggunaan
- (3) – (13) Diisi sesuai dengan jumlah konsumsi bahan bahan bakar yang digunakan.

Tabel 39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Data :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mobil Beban				
2.	Penumpang pribadi				
3.	Penumpang umum				
4.	Bus besar pribadi				
5.	Bus besar umum				
6.	Bus kecil pribadi				
7.	Bus kecil umum				
8.	Truk besar				
9.	Truk kecil				
10.	Roda tiga				
11.	Roda dua				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan

(1) dan (2) Cukup Jelas

(3) diisi dengan jumlah unit kendaraan

(4) – (5) Diisi dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan dengan satuan unit sesuai dengan bahan bakar yang digunakan

Tabel 40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Data :

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (km)	
		tahun	tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jalan Bebas Hambatan		
2.	Jalan Raya		
3.	Jalan Sedang		
4.	Jalan Kecil		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Tabel :

(1) dan (2) Cukup Jelas

Ket: Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil

Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
dst			

Keterangan:

Sumber:

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan jenis dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))
- (3) Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan
- (4) Diisi dengan nama pemrakarsa

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012

Definisi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Definisi UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dst			

Keterangan :

Sumber :

**Penjelasan isi tabel :**

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3
- (3) Diisi dengan jenis kegiatan/usaha sesuai dengan lampiran
- (4) Diisi dengan jenis izin : penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, atau pengangkutan
- (5) Diisi dengan nomor SK yang berlaku pada tahun penyusunan laporan

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Tahun Data :

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
dst			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama perusahaan/pemrakarsa izin lingkungan
- (3) Diisi dengan tanggal/bulan/tahun pelaksanaan pengawasan
- (4) Diisi dengan hasil pengawasan izin lingkungan

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Tabel-44. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5	Dst				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan total area terendam dalam satuan hektar (Ha)
- (4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang
- (5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan orang
- (6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah

Tabel-45. Bencana Kekeringan, Luas, dan Kekeringan  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	Dst		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan total area yang terkena dampak kekeringan dalam satuan hektar (Ha)

(4) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat kekeringan dalam satuan rupiah

Tabel-46. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	Dst		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

(1) Nomor urut

(2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan

(3) Diisi dengan jumlah perkiraan luas hutan /lahan terbakar dalam satuan hektar (Ha)

(4) Diisi dengan menggunakan nilai rupiah

Tabel-47. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5	Dst..			

Keterangan :

Sumber Data :

Penjelasan Isi Tabel :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi Jenis bencana, selain bencana banjir kekeringan misalnya : tanah longsor, gempa bumi, tsunami, puting beliung
- (4) Diisi dengan jumlah korban meninggal dalam satuan orang
- (5) Diisi dengan perkiraan kerugian dalam satuan rupiah

Tabel-48 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Tahun Data :

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4	Dst..				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan Isi Tabel :

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan kabupaten/kotayang ada di provinsi penyusun laporan.
- (3) Diisi dengan luas kabupaten/kota
- (4) Diisi dengan jumlah penduduk .
- (5) Diisi dengan prosentase pertumbuhan penduduk.
- (6) Diisi dengan prosentase kepadatan penduduk.

Tabel 49. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Propinsi/Kota/Kab	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M3)	Volume Eksisting (M3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

Sumber :

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Apabila Propinsi maka TPA yang diisi adalah TPA kab/kota

Kolom 2 : Apabila Kab/Kota maka TPA yang diisi adalah TPA kecamatan

Kolom 3 : Cukup jelas

Kolom 4 : Cukup jelas

Kolom 5 : Cukup jelas

Kolom 6 : Cukup jelas

Kolom 7 : Cukup jelas



Tabel-50. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	JumlahPenduduk	Timbulan Sampah (M3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
dst			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1,2,3,....
- (2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
- (3) Diisi dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota
- (4) Diisi dengan perkiraan timbulan sampah dalam satuan kilogram per hari

Tabel. 51 Jumlah Bank Sampah

Provinsi/Kabupaten/Kota:...

Tahun Data :

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan Tabel:

Kolom 1: Cukup Jelas

Kolom 2: Cukup Jelas

Kolom 3: Diisi dengan dasar hukum pendirian bank Sampah

Kolom 4: Diisi dengan jumlah sampah yang diterima setiap bulan

Kolom 5: Diisi dengan status bank Sampah (Aktif atau tidak Aktif)

Kolom 6: Diisi dengan Wilayah pelayanan bank sampah

Kolom 7: Diisi dengan jumlah penabung aktif

Kolom 8: Diisi dengan Jumlah karyawan yang bertugas

Kolom 9: Diisi dengan Omset dari Bank Sampah (dalam Rupiah)

Tabel-52. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
dst			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, .....
- (2) Diisi dengan nama kegiatan fisik lingkungan contoh : pembuatan kompos, pembersihan saluran air/selokan.
- (3) Diisi dengan lokasi kegiatan fisik lingkungan
- (4) Diisi dengan pelaksana kegiatan fisik lingkungan (oleh pemerintah, masyarakat, swasta)

Tabel-53. Status Pengaduan Masyarakat  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
dst			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, ....
- (2) Diisi dengan pihak yang mengadukan (perseorangan, kelompok, lembaga swasta, instansi pemerintah)
- (3) Diisi dengan masalah lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat
- (4) Diisi dengan status dan tindak lanjut pengaduan.

Tabel-54. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
Dst			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama LSM lingkungan hidup
- (3) Diisi dengan akta pendirian LSM lingkungan hidup
- (4) Diisi dengan alamat LSM lingkungan hidup

Tabel-55. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Tahun Data :

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)			
2.	Master (S2)			
3.	Sarjana (S1)			
4.	Diploma (D3/D4)			
5.	SLTA			
	Jumlah			

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor Urut diisi dengan angka 1, 2, 3, ....
- (2) Cukup jelas
- (3) Diisi dengan jumlah personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan jenis kelamin Laki-laki
- (4) Diisi dengan jumlah personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan jenis kelamin perempuan
- (5) Diisi dengan jumlah keseluruhan kolom 3 dan 4

Tabel-56. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dst						

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel :

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama instansi asal
- (3) Diisi dengan nama jabatan fungsional berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- (4) Diisi dengan jumlah staf fungsional laki-laki
- (5) Diisi dengan jumlah staf fungsional perempuan
- (6) Diisi dengan jumlah staf laki-laki yang sudah mengikuti diklat
- (7) Diisi dengan jumlah staf perempuan yang sudah mengikuti diklat

Tabel-57. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2) Diisi dengan nama orang/kelompok/organisasi penerima penghargaan lingkungan hidup
- (3) Diisi dengan nama penghargaan lingkungan hidup contoh : Adipura, Kalpataru, dll
- (4) Diisi dengan instansi pemberi penghargaan lingkungan hidup (pemerintah/swasta)
- (5) Diisi dengan tahun penerimaan penghargaan lingkungan hidup



Tabel-58. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data:

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dst				

Keterangan:

Sumber:

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, ....
- (2) Diisi dengan nama kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Contoh: penyuluhan, kampanye, iklan layanan masyarakat, talkshow.
- (3) Diisi dengan instansi penyelenggara kegiatan sosialisasi lingkungan hidup
- (4) Diisi dengan kelompok sasaran kegiatan sosialisasi lingkungan hidup
- (5) Diisi dengan bulan/tahun kegiatan penyuluhan

Tabel-59. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN		
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalian		
3.	Industri Pengolahan		
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih		
5.	Bangunan		
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
7.	Pengangkutan dan Komunikasi		
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		
9.	Jasa-Jasa		
	PRODUK DOMESTIK BRUTO		
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) dan (2) Cukup Jelas

(3)-(4) Diisi dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor/Sub Sektor pada masing-masing daerah yang bersangkutan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik selama 2 (dua) tahun

Tabel-60. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN		
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalian		
3.	Industri Pengolahan		
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih		
5.	Bangunan		
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
7.	Pengangkutan dan Komunikasi		
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		
9.	Jasa-Jasa		
	PRODUK DOMESTIK BRUTO		
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(3)-(4) Diisi dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor/Sub Sektor pada masing-masing daerah yang bersangkutan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik selama 2 (dua) tahun

Tabel-61. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dst				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst
- (2)- (3) Diisi dengan jenis produk hukum, contoh : Peraturan, SK Gubernur/Bupati/Walikota, MoU, dll
- (3) Diisi dengan nomor dan tanggal peraturan yang tersebut
- (4) Diisi dengan perihal peraturan

Tabel-62. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dst				

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, ....
- (2) Cukup Jelas
- (3) Diisi dengan peruntukan anggaran
- (4) Diisi dengan jumlah anggaran tahun sebelumnya, contoh : jika Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014 maka diisi tahun sebelumnya yaitu 2013
- (5) Diisi dengan jumlah anggaran tahun berjalan, sesuai tahun disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Tabel-63. Pendapatan Asli Daerah  
Provinsi/Kabupaten/Kota :  
Tahun Data :

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	
2	Retribusi	
3	Laba BUMD	
4	Pendapatan lainya yang Sah	
5	Jumlah	

Keterangan :

Sumber :

Penjelasan isi tabel:

(1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, ....

(2) Cukup Jelas

Tabel-64. Inovasi Pengelolaan LH daerah  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Kab/kota/kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	2	3	4	5

Sumber :

Keterangan:

Tabel-65. Pelestarian Kearifan Lokal LH  
Provinsi/Kabupaten/Kota:  
Tahun Data :

No.	Kab/kota/kec	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sumber :

Keterangan:

Kolom (1) : Nomor Urut

Kolom (2) : Cukup Jelas

Kolom (3) : Cukup Jelas

Kolom (4) : Cukup Jelas

Kolom (5) : Cukup Jelas